CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

JANUARI - JUNI 2026

SATKER DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	72
F. Pengungkapan Penting Lainnya	76
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang terdiri dari : **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang terdiri dari : **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

DAFTAR TABEL

	Hal
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Kualitas Piutang	13

Keterangan: Daftar tabel disesuaikan dengan kondisi CaLK

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Periode (disesuaikan dengan periode pelaporan)** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor **71 Tahun 2010** tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dan berdasarkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode **1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026**

Realisasi Pendapatan Negara periode 291.403.000 adalah berupa **Penerimaan Negara Bukan Pajak** sebesar ***Rp 700.000*** atau mencapai ***0%*** dari estimasi Pendapatan LRA sebesar ***Rp700.000***.

Realisasi Belanja Negara periode 1 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026 adalah sebesar ***Rp0*** atau mencapai **0%** dari alokasi anggaran sebesar ***Rp1.000***.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai **Aset, Kewajiban, dan Ekuitas** per **30 Juni 2026.**

Nilai **Aset per 30 Juni 2026** dicatat dan disajikan sebesar ***Rp0*** yang terdiri dari **Aset Lancar** sebesar ***Rp0***, **Aset Tetap** sebesar ***Rp0*** **Aset Lainnya** sebesar ***Rp0***.

Nilai **Kewajiban dan Ekuitas** masing - masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. **Pendapatan - LO** untuk periode sampai dengan **30 Juni 2026** adalah sebesar ***Rp0***, sedangkan **Jumlah Beban adalah sebesar** ***Rp0*** sehingga terdapat **Defisit dari Kegiatan Operasional** senilai ***Rp0***, **Defisit dari Kegiatan Non Operasional** sebesar ***Rp700.000*** sehingga entitas mengalami **Defisit - LO** sebesar ***Rp700.000***.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. **Ekuitas pada 30 Juni 2026** adalah sebesar ***Rp700.000*** dikurangi Defisit - LO sebesar ***Rp700.000*** kemudian ditambah dengan Koreksi - Koreksi senilai ***Rp0***

dan ditambahkan Transaksi Antar Entitas ***Rp700.000***, sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal **30 Juni 2026** adalah senilai ***Rp0.***

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK Adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga menerapkan basis akuntansi kas menuju akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor **71 Tahun 2010** tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis kas,** maka di dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk **30 Juni 2026** disusun dan disajikan berdasarkan basis kas karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Sedangkan berdasarkan **PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan,** disebutkan bahwa Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk **30 Juni 2026** disusun dan disajikan dengan basis akrual karena transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026				2025			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di atas (bawah) terhadap Anggaran	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di atas (bawah) terhadap Anggaran	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**B.1**	0	700.000	700.000	**0**	0	0	0	0
B. Belanja Negara		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2**	1.000	0	1.000	0	2.321.000.000	0	2.321.000.000	0
1. Belanja Pegawai	**B.3**	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	**B.4**	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	**B.5**	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.321.000.000**	**0**	**2.321.000.000**	**0**

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prov. Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si

II. NERACA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(*Dalam Rupiah*)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		**0**	**0**
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibutasi Penggunaanya	C.3	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		**0**	**0**
JUMLAH ASET		**0**	**0**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.6	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.7	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**0**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0**	**0**
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	0	0
JUMLAH EKUITAS		**0**	**0**
JUMLAH EKUITAS		**0**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**0**	**0**

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**0**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Barang dan Jasa	D.2	0	291.403.000
Beban Perjalanan Dinas	D.3	0	0
JUMLAH BEBAN		-	**291.403.000**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(0)**	**(291.403.000)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.4		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		700.000	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(700.000)**	**(0)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(700.000)**	**(291.403.000)**
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		**(700.000)**	**(291.403.000)**

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP. 19760422 199303 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(700.000)	(291.403.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
LAIN-LAIN	E.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	700.000	291.403.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	0	0
EKUITAS AKHIR	**E.7**	700.000	291.403.000

Serang, Juli 2026
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten,

Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si
NIP.19760422 199303 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan melalui penguatan kapasitas pemuda, peningkatan prestasi olahraga, pemberdayaan organisasi kepemudaan, pembinaan atlet secara berkelanjutan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing, Mandiri, Berkarakter, serta Masyarakat Banten yang Sehat dan Berprestasi melalui Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan melalui pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan partisipasi pemuda
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga secara berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan serta olahraga.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional, dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel.
5. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan serta olahraga secara optimal.

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan

Laporan Keuangan **39 Juni 2026** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Laporan Keuangan

(SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.

Aplikasi SAKTI terdiri dari Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Piutang, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi & Pelaporan. Modul yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan yaitu menggunakan Modul Akuntansi & Pelaporan. Ruang lingkup Modul Akuntansi & Pelaporan yaitu sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul – modul lain terkait, sistem pelaporan manajerial, dan sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan. Modul Akuntansi & Pelaporan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten menerapkan basis akuntansi kas menuju akrual. Basis akrual diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **1 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara, yang menambah Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan-LRA diakui saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

c. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

e. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs transaksi.

2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat, yang diakui sebagai penambah ekuitas, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah Pendapatan LO Lainnya yang merupakan setoran pengembalian tahun anggaran yang lalu.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode Laporan Keuangan.

e. Pendapatan disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS)

3. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara, yang

Belanja

mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

c. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh BUN.

d. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

e. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Belanja dalam mata uang asing diukur dan dicatat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

1) Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas Lainnya, Piutang Jangka Pendek, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan.
2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
3) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
4) Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode FIFO dengan berdasarkan

hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

b) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Nilai Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan.

3) Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka didasarkan pada nilai wajar.

4) Aset tetap diakui pada saat transfer kepemilikan atau diserahkan hak kepemilikan dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

5) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

6) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruangan (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.

7) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

   a) Tanah;

   b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

   c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang, berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 jo 266/KM.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2) Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang tunai milik pemerintah yang penggunaannya terikat untuk membiayai kegiatan tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas untuk operasional sehari-hari.

3) Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

4) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

5) Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasionalentitas yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

5. Kewajiban

Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dan direalisasikan kurang dari 12 bulan, maka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban dalam mata uang asing diukur dan dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

6. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

7. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten telah disahkan sejak 30 Juni 2026. Adapun rincian DIPA Satker Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rincian DIPA Periode 30 Juni 2026

No	Satker	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi [illegible]	1.950.212.000	1.000
	Jumlah	**1.950.212.000**	**1.000**

DIPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten setelah revisi mengalami penurunan/kenaikan sebesar ***(Rp1.000)*** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Periode 30 Juni 2025

No	Satker	Anggaran		Naik/(Turun)
		Semula	Menjadi	
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.321.000.0000	0	0
Jumlah		**2.321.000.0000**	**0**	**0**

Penurunan/kenaikan anggaran belanja pada Satker Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebesar 0% dikarenakan oleh (dijelaskan kenaikan/penurunanya dikarenakan apa)

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp0

Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2026 sebesar ***Rp0*** atau mencapai 0% dari nilai estimasi pendapatan sebesar ***Rp0***. Berikut adalah tabel perbandingan estimasi dan realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2026:

Tabel 3. Estimasi dan Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2026

Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Neto	%
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

Pendapatan Lain-Lain sebesar *Rp0* atau *0%* dari estimasi ***Rp0***, yang diperoleh dari realisasi pendapatan bruto sebesar ***Rp0*** dikurangi dengan nilai pengembalian sebesar ***Rp0***. Rincian Pendapatan Lain-Lain sebagai berikut:

a. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar *Rp0* merupakan realisasi pendapatan neto, yang diperoleh dari realisasi pendapatan bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian pendapatan sebesar ***Rp0*** merupakan pengembalian. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912).

b. Realisasi Pendapatan Anggaran Lain - lain (425999) sebesar *Rp0*, yang diperoleh dari realisasi pendapatan bruto sebesar ***Rp0*** dikurangi dengan nilai pengembalian sebesar ***Rp0***. Pendapatan Anggaran Lain - lain (425999) merupakan. Realisasi Pendapatan Anggaran Lain - lain (425999).

Realisasi Pendapatan untuk Periode **2026** sebesar ***Rp0*** mengalami penurunan/kenaikan sebesar ***(Rp0)*** atau **(0%)** dibandingkan dengan periode **30 Juni 2026** sebesar ***Rp0.***

Di bawah ini merupakan tabel perbandingan realisasi pendapatan Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan

Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

Dari tabel perbandingan realisasi pendapatan dapat dijelaskan kenaikan/penurunan yang signifikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan atas Pendapatan Lain-lain sebesar ***(Rp0)*** atau **(0%)** dikarenakan adanya penurunan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912).
2. Terdapat penurunan atas Pendapatan Lain-lain sebesar ***(Rp0)*** atau **(0%)** dikarenakan Pendapatan Anggaran Lain - lain (425999).

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp0

Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2026 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar ***Rp0*** atau mencapai **0%** dari anggaran belanja sebesar ***Rp1.000.*** Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja **Periode 30 Juni 2026** adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2026

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	1.000	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja **Periode 30 Juni 2026** dapat dilihat dalam Grafik berikut ini:

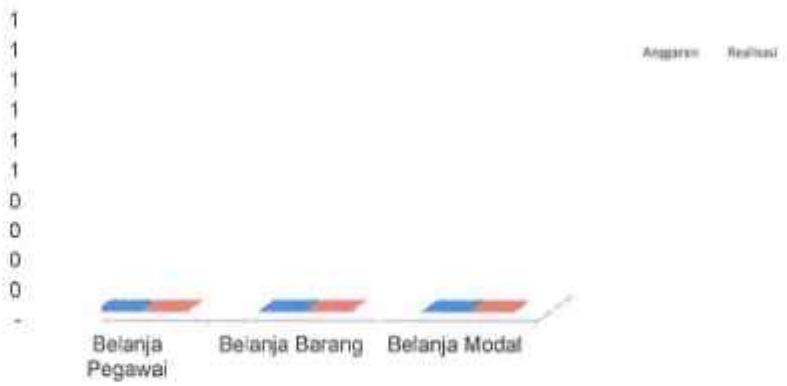

Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2026 dan **Periode 30 Juni 2025** setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah masing-masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0*** sehingga mengalami penurunan/ kenaikan sebesar ***(Rp0)*** atau **0%**. Perbandingan Realisasi Belanja Neto Periode 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	31 Desember 2026	31 Desember 2025	Naik/(Turun)	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

Dari tabel perbandingan realisasi Belanja dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan/kenaika Belanja Barang sebesar *(Rp0)* atau **(0%).**

Sedangkan realisasi belanja neto berdasarkan program Periode 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Periode 30 Juni 2026

Kode	Uraian Program	Pagu	Realisasi	%
092.01.DA	Program Keolahragaan	1.000	0	0
	Jumlah	**1.000**	0	**0**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2026 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar ***Rp0*** atau mencapai **0%** dari anggaran belanja sebesar ***Rp0.***

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp0

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2026 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar ***Rp0*** atau mencapai **0%** dari anggaran belanja sebesar ***Rp0.*** Rincian anggaran dan realisasi belanja barang **30 Juni 2026** adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Periode 30 Juni 2026

Uraian Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	1.000	0	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	0	0
Jumlah	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Realisasi Belanja Barang Periode 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025 setelah dikurangi

dengan pengembalian belanja adalah masing-masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0*** sehingga mengalami penurunan/kenaikan sebesar ***(Rp0)*** atau (0%).

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Periode 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

1. **Realisasi Belanja Barang Operasional (5211)** sebesar ***Rp0*** merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Rincian Belanja Barang Operasional sebagai berikut:
   a. Realisasi **Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115)** sebesar *Rp0.* Belanja 521115 dipergunakan untuk membayar honor kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja antara lain pembayaran honorarium UAKPA, UAKPB, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penanggung Jawab Pengelola;
   b. Realisasi **Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)** sebesar *Rp0.* Belanja 521119 dipergunakan dalam rangka menunjang Program/Kegiatan.
2. **Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212)** sebesar ***Rp0*** merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Rincian Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:
   a. Realisasi **Belanja Bahan (521211)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0***. Belanja 521211 dipergunakan untuk pembayaran;
   b. Realisasi **Belanja Honor Terkait Output Kegiatan (521213)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0***. Belanja 521213 dipergunakan untuk pembayaran.
3. **Realisasi Belanja Jasa (5221)** sebesar ***Rp0*** merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja

sebesar ***Rp0.*** Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

a. Realisasi **Belanja Sewa (522141)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0***. Belanja 522141 dipergunakan untuk pembayaran;

b. Realisasi **Belanja Jasa Profesi (522151)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0***. Belanja 522151 dipergunakan untuk pembayaran.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar ***Rp0*** merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Realisasi **Belanja Perjalanan Biasa (524111)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Belanja 524111 dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas pegawai dalam negeri;

b. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Belanja 524113 dipergunakan untuk membiayai pengeluaran perjalanan dinas pegawai;

c. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0*** . Belanja 524114 dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas pegawai;

d. Realisasi **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)** sebesar *Rp0* merupakan realisasi anggaran belanja neto, yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar ***Rp0*** dengan nilai pengembalian belanja sebesar ***Rp0.*** Belanja 524119 dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas pegawai.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2026 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar ***Rp0*** atau mencapai **0%** dari anggaran belanja sebesar ***Rp0.***

B.6 Catatan Penting Lainnya

Capaian Output per Fungsi APBN

Capaian Output per Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2026 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten:

a. **Pendidikan (10)**

Tabel 20. Capaian Rincian Output Fungsi Pendidikan

Kode	Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Target Keluaran	Realisasi Keluaran	%	Keterangan
Dalam								
290002	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	0	0	0	0	0	0	Pembinaan atlet SPORNAS secara berkelanjutan

Program Prioritas Nasional

Capaian Output per Prioritas Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) yaitu **Prioritas Nasional IV: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional **PN IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan PN IV diantaranya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten melalui program prioritas yaitu Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga dengan pagu mencapai ***Rp0*** dan realisasi sebesar ***Rp0*** atau *0%* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Pencapaian Output Prioritas Nasional IV

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	0	0	0	Orang/ Permen	0	0	0
JUMLAH	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0

Saldo di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Mutasi atas Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 28. Mutasi di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Nilai
Saldo *Audited* TA 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo per 3x bulan 202x	**0**

Rincian Mutasi di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 sebesar ***Rp0***;
2. Mutasi Tambah sebesar ***Rp0***;
3. Mutasi Kurang sebesar ***Rp0***.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Mutasi atas Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Mutasi Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Nilai
Saldo *Audited* TA 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	**0**

Rincian Mutasi Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 sebesar ***Rp0***;
2. Mutasi Tambah sebesar ***Rp0***
3. Mutasi Kurang sebesar ***Rp0***.

C.3 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaanya Rp0

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaanya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan. Mutasi atas Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Keterangan	Nilai
Saldo *Audited* TA 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	**0**

Rincian mutasi atas Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 sebesar ***Rp0***;

2. Mutasi Tambah sebesar ***Rp0***;
3. Mutasi Kurang sebesar ***Rp0.***

C.4 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1.	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Mutasi atas Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 76 Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0	(0)	0
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0	(0)	0
Jumlah	**0**	0	**(0)**	**0**

Rincian mutasi atas Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 adalah sebesar ***Rp0***;
2. Mutasi Tambah sebesar ;
3. Mutasi kurang sebesar.

C.5 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban pemerintah/entitas yang timbul akibat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa yang telah diterima, namun

tagihan (*invoice*) belum diajukan oleh pihak ketiga hingga akhir periode pelaporan. Mutasi atas Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 79. Mutasi Utang Yang Belum Ditagihkan

Keterangan	Nilai
Saldo *Audited* TA 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	**0**

Rincian mutasi atas Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 sebesar ***Rp0***.
2. Mutasi Tambah sebesar ***Rp0.***
3. Mutasi Kurang sebesar ***Rp0.***

C.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0.*** Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor. Saldo ini merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pajak Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke kas negara. Mutasi atas Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

Keterangan	Nilai
Saldo *Audited* TA 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	**0**

Rincian mutasi atas Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Saldo *Audited* TA 2026 sebesar ***Rp0***;
2. Mutasi Tambah sebesar
3. Mutasi Kurang sebesar

C.7 Ekuitas

Ekuitas Rp 292.103.000

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar ***Rp700.000*** dan ***Rp291.403.000***. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Ekuitas

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	**0**	**0**
Surplus/Defisit-LO	(700.000)	(291.403.000)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi atas Reklasifikasi	0	0
Selisih Revaluasi Aset	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	0
Lain – Lain	0	0
Transaksi Antar Entitas	700.000	0
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	0	291.403.000
Ekuitas Akhir	**700.000**	**291.403.000**

Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp0

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan periode **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***, seperti pada tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Sedangkan perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan basis akrual dan basis kas seperti pada tabel berikut:

Tabel 29. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Basis Akrual dan Basis Kas

Periode 30 Juni 2026

Uraian	PNBP Basis Akrual	PNBP Basis Kas	Selisih
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Selisih antara PNBP basis akrual dan basis kas sebesar ***Rp0*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Penambahan atas Pendapatan Akrual sebesar *Rp0*** dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pekerjaan Pemerintah sebesar *Rp0* ;
   b. Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar *Rp0* merupakan (dijelaskan atas apa kalau ada).
2. **Pengurangan atas Pendapatan Akrual sebesar *Rp0*** dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pekerjaan Pemerintah sebesar *Rp0* ;
   b. Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar *Rp0* merupakan (dijelaskan atas apa kalau ada).

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp0

Beban Barang dan Jasa **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing-masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 30 Juni 2026 dan Periode 30 Juni 2025

Uraian	3x bulan 202x	3x bulan 202x	Naik/ (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Bahan	0	0	0
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Sedangkan Perbandingan Beban Barang dan Jasa basis akrual dan basis kas seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 81. Perbandingan Beban Barang dan Jasa Basis Akrual dan Basis Kas

Periode 30 Juni 2026

Uraian	Beban Basis Akrual	Beban Basis Kas	Selisih
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Bahan	0	0	0
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Selisih antara Beban Barang dan Jasa basis akrual dan kas sebesar ***Rp0*** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penambahan atas Beban Barang dan Jasa Akrual sebesar *Rp0*** terdiri atas:
   a. Beban Honor Output Satuan Kerja sebesar *Rp0* ;
   b. Beban Barang Operasional Lainnya sebesar *Rp0* ;
   c. Beban Bahan sebesar *Rp0* ;
   d. Beban Honor Output Kegiatan sebesar *Rp0* ;
   e. Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar *Rp0* ;
   f. Beban Jasa Konsultan sebesar *Rp0* ;
   g. Beban Sewa sebesar *Rp0* ;
   h. Beban Jasa Profesi sebesar *Rp0* ;
   i. Beban Jasa Lainnya sebesar *Rp0*.
2. **Pengurangan atas Beban Barang dan Jasa sebesar *Rp0*** terdiri atas:
   a. Beban Honor Output Satuan Kerja sebesar *Rp0* ;
   b. Beban Barang Operasional Lainnya sebesar *Rp0* ;
   c. Beban Bahan sebesar *Rp0* ;
   d. Beban Honor Output Kegiatan sebesar *Rp0* ;
   e. Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar *Rp0* ;
   f. Beban Jasa Konsultan sebesar *Rp0* ;
   g. Beban Sewa sebesar *Rp0* ;
   h. Beban Jasa Profesi sebesar *Rp0* ;
   i. Beban Jasa Lainnya sebesar *Rp0*.

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp0

Beban Perjalanan Dinas **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing-masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Sedangkan perbandingan Beban Perjalanan Dinas basis akrual dan basis kas seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 85. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Basis Akrual dan Basis Kas

Periode 30 Juni 2026

Uraian	Beban Basis Akrual	Beban Basis Kas	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Selisih Beban Perjalanan Dinas basis akrual dan basis kas sebesar ***Rp0*** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penambahan atas Beban Perjalanan Dinas Akrual** sebesar ***Rp0*** terdiri atas:
   a. Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar *Rp0* ;
   b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar *Rp0* ;
   c. Beban Perjalanan Dinas Paket Dalam Kota sebesar *Rp0*.
2. **Pengurangan atas Beban Perjalanan Dinas Akrual** sebesar ***Rp0*** terdiri atas:
   a. Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp0 ;
   b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp0 ;
   c. Beban Perjalanan Dinas Paket Dalam Kota sebesar.

D.4 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp0)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan periode **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing-masing sebesar ***(Rp0)*** dan ***(Rp0)*** dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 90. Rincian Kegiatan Non Operasional Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**(0)**	**(0)**	**0**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**0**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(0)**	**(0)**	**0**

Rincian Kegiatan Operasional 30 Juni 2026:

1. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar ***(Rp0)*** terdiri atas:
   a. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar *Rp0* ;
   b. Beban Pelepasan Aset non Lancar sebesar *Rp0*.
2. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar ***Rp0*** merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

   Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar *Rp0* dan *Rp0* dengan rincian seperti sebagai berikut:

Tabel 91. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 JUni 2025	Naik/ (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar *Rp0* dan *Rp0* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Rincian Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Rincian Beban Operasional Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar

Rp700.000.

Perbandingan antara Pendapatan Operasional Lainnya basis akrual dan basis kas adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 93. Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya

30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Beban Basis Akrual	Beban Basis Kas	Selisih
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Terdapat selisih Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya sebesar ***Rp700.000*** merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0.*** Nilai Ekuitas Awal tahun 2026 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 30 Juni 2026 pada Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Periode 30 Juni 2026 (*Audited*). Terjadi penurunan sebesar ***Rp0*** atau 0% dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2026.

E.2 Surplus / Defisit LO

Defisit LO (Rp 2092.103.000)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***(Rp700.000)*** dan ***(Rp291.403.000)***. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO pada periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar ***Rp292.103.000*** dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas (Rp0)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0.*** Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 106. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun)%
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0
Koreksi atas Reklasifikasi	0	0	0
Selisih Revaluasi Aset	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	0	0
Koreksi Lain-Lain	0	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	**0**	**0**	**0**

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***. Koreksi Nilai Persediaan.

E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0.*** Koreksi Atas Reklasifikasi per 30 Juni 2026.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0 dan Rp0***. Selisih Revaluasi Aset Tetap.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0.*** Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2026.

E.4. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing-masing sebesar ***Rp0*** dan ***Rp0***

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp700.000

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah masing-masing sebesar ***Rp700.000*** dan ***Rp0***. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/ (Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	700.000	0	0

Diterima dari Entitas Lain	0	(0)	0
Transfer Keluar	0	(0)	0
Transfer Masuk	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

E.6 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Penurunan Ekuitas Rp292.103.000

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp700.000*** dan ***Rp291.403.000***. Kenaikan Ekuitas timbul karena terdapat defisit – LO yang lebih kecil dari nilai transaksi antar entitas. Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 108. Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/(Turun)%
Surplus/Defisit – LO	(700.000)	(291.403.000)	0
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	0	0	100.24
Transaksi Antar Entitas	700.000	0	0
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**0**	291.403.000	**100**

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp292.103.000

Nilai Ekuitas pada tanggal **30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025** adalah sebesar ***Rp700.000*** dan ***Rp291.403.000***. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas. Nilai ekuitas akhir mengalami kenaikan sebesar ***Rp0*** atau 0% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2026.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Perubahan Pengelola Keuangan

Berdasarkan Perda tentang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten bahwa terdapat perubahan Pengelola Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten . Susunan Pengelola Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten terdiri atas:

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Kuasa Pengguna Anggara (KPA)	Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si	2025 -2026
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakil kepala dinas (jika ada)	Imam Santoso, SE, M.Si	2025 -2026
3	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Uke Mochamad Luthfan, S.IP, M.Si	2025 -2026
4	Bendahara Pengeluaran (BP)	Meta Yuliana, Amd	2025 -2026
5	Dst	Nama terang	2025 -2026

2. Dapat mengungkapan hal lain yang tidak masuk dalam laporan keuangan tetapi berpengaruh terhadap laporan keuangan.

    a. DISPORA Provinsi Banten telah melaksanakan Program Keolahragaan dalam kegiatan Pengelolaan Sertaa Pembinaan Olahragawan Muda mulai Januari sampai dengan April 2026. Seluruh anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut belum dibayarkan sejumlah Rp. 642,620,000 ,-. Dengan rincian sebagai berikut
        - Honorarium satuan kerja SPOBNAS hingga April 2026 sebesar Rp. 15.240.000
        - Honorarium Tenaga Pendukung SPOBNAS sampai April 2026 sebesar Rp 16.000.000
        - Honorarium Pengelola SPOBNAS hingga April Rp 12.600.000
        - Honorarium Jasa Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet s.d April 2026 Rp 116.400.000
        - Konsumsi Atlet s.d April 2026 Rp 249,500,000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	700,000	(291,403,000)	292,103,000	(100.24)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(700,000)	0	(700,000)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(291,403,000)	291,403,000	(100)
EKUITAS AKHIR	0	(291,403,000)	291,403,000	(100)

Keterangan :

FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Dinas

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

197404221993031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 092
ESELON I : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 01
SATUAN KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN 290062

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM
Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**700,000**	**700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**700,000**	**700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,000	0	(1,000)	0	2,321,000,000	0	2,321,000,000	0
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,000	0	(1,000)	0	2,321,000,000	0	2,321,000,000	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 092
ESELON I : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 01
SATUAN KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN 290062

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM
Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**1,000**	**0**	**(1,000)**	**0**	**2,321,000,000**	**0**	**2,321,000,000**	**0**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Dinas

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si
197404221993031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

ESELON I : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM

Tgl Cetak : 16/07/26 2:50 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	0	291,403,000	(291,403,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	(291,403,000)	291,403,000	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	700,000	0	700,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	700,000	0	700,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	700,000	0	700,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	700,000	(291,403,000)	292,103,000	(100.24)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	700,000	(291,403,000)	292,103,000	(100.24)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM

Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	700,000	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	700,000
JUMLAH			**700,000**	**700,000**

Keterangan :

FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Dinas

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

197404121993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	700,000	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	700,000
JUMLAH			700,000	700,000

Keterangan :

FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Dinas

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

197404221993031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

ESELON I : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM
Tgl Cetak : 16/07/26 2:50 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	291,403,000	(291,403,000)	(100)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 092**	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**
ESELON I	**: 01**	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 290062**	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	**: DK**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/26 2:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/26 12:59 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,320,000	0	0	0	0		0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	664,936,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	714,256,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	714,880,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	716,480,000	1,000	0	0	0	0	1,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	490,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	490,000,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,264,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,264,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 092**	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**
ESELON I	**: 01**	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 290062**	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	**: DK**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/26 2:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/26 12:59 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,320,000	0	0	0	0		0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	664,936,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	714,256,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	714,680,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	716,480,000	1,000	0	0	0	0	1,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	490,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	490,000,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,264,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,264,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 092 **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

SATUAN KERJA : 290062 **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN**

Tanggal : 16/07/26 2:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_fsfpg_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
10	**PENDIDIKAN**							
10	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**							
DA	**Program Keolahragaan**							
3823	Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH PROGRAM Program Keolahragaan	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**
	JUMLAH SUBFUNGSI PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**
	JUMLAH FUNGSI PENDIDIKAN	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ESELON I	: 01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
WILAYAH/PROVINSI	: 092012900	BANTEN
SATUAN KERJA	: 290062	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: DK	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/26 2:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
3823	Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi							
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,320,000	0	0	0	0	0	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	664,936,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	714,256,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	714,880,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	716,480,000	1,000	0	0	0	0	1,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	490,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	490,000,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,264,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,264,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3823.QDC	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3823	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH BELANJA	2,000,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/26 2:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 092 **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

SATUAN KERJA : 290062 **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,320,000	0	0	0	0	0	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	664,936,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	714,880,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	490,000,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,264,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**
	TOTAL	**2,000,000,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290062) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Tgl Data : 16/07/26 12:47 PM

Tgl Cetak : 16/07/26 2:51 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :

FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Dinas

Dr. H. AHMADS FAUKANI, M.Si

197404221993031001 197404221993031001

Keterangan :

FINAL

Kota Serang, 16 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Dinas

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

197404221993031001